

NO	NIM	NAMA	judul	ISU	USULAN DOSEN	berkas fisik/ g.form	Tim 1	Tim 2	Tim 3	Tim 4	Tim 5 Diterima/ Ditolak
1	210203110071	Raihan Dzaky Ferdiansyah	KONSISTENSI PENANGANAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PASAL 310 KUHP WVS & PASAL 433 KUHP NASIONAL	Pencemaran nama baik	Irham Bashori Hasba, M.H	Lengkap	tidak ada plagiasi	kajian HTNnya perlu ditambah	dtrima dgn perbaikan redaksi	diterima dg diberikan catatan: daripada mengkaji konsistensinya pdhl psl 433 KUHP	Diterima
2	210203110097	Ike Tina Nova Novita	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Pembangunan berkelanjutan di Kota Malang belum dilakukan secara merata seperti revitalisasi pasar, pembangunan drainase, proyek WTP, terminal hamid rusdi, dan beberapa taman kota. Bahkan pada tahun 2023 terjadi kebocoran pajak senilai 2 Milyar Rupiah dikarenakan terjadi	Nur Jannani, S.HI., M.H.	Lengkap	tidak ada plagiasi	ol	dterima dgn perbaikn redaksi shg lbh fokus	ditolak: isu hukum tidak jelas	Diterima
3	210203110097	Ike Tina Nova Novita	EVEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH TERHADAP KAWASAN BUDI DAYA PARIWISATA DAN PERMUKIMAN PERSPEKTIF MASLAHAH	Tata ruang kota malang dinilai belum maksimal karena sampai saat ini permasalahan yang kerap terjadi seperti rawan banjir akibat dari semakin padatnya permukiman dan kemacetan yang biasa terjadi di kawasan wisata kayutangan, pasar besar,	Abdul Kadir, S.HI., M.H.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	Diterima
4	210203110069	Nadiva Salma Azzahra	URGENSI PENERAPAN E-COKLIT SEBAGAI SISTEM IDENTIFIKASI KEABSAHAN DATA PEMILIH PADA PILKADA 2024 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI DI KPU KOTA BATU)	Kontradiksi antara penerapan dan peraturan dalam upaya KPU mengidentifikasi keabsahan data pemilih melalui metode coklit pada pemilihan sebelumnya. Pemerintah berupaya menghadirkan aplikasi E-Coklit untuk	Abdul Kadir, S.HI., M.H.	Lengkap	diluar siyasaah syariyah sudah ada penelitian sejenis di kota lain http://ejournal.wa-runayama.org/index.php/triwikrama/article/view/5491	ditolak	dtolak	ditolak	Ditolak
5	210203110069	Nadiva Salma Azzahra	KAJIAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL DALAM PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH	Takaran keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni masalah keadilan dalam pembentukan Permendikbudristek yang mengatur tentang kenaikan uang kuliah tunggal yang pada penerapannya dinilai	Sheila Kusuma WA, SH., MH.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	Diterima

6	210203110017	MAHANANI ANISA PUTRI	Positivisasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Tari Turonggo Yakso Menurut Hukum Progresif Perspektif Masalah Mursalah	Memudarnya nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam Tari Turonggo Yakso akibat arus globalisasi yang belum bisa di cover dalam pengakuan	Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima
7	210203110093	Septi Indah Novita Sari	ANALISIS YURIDIS HAK POLITIK MANTAN NARAPIDA UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/ PUU / XVII/ 2019 tentang pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah sudah sesuai dengan teori tujuan hukum dan Bagaimana pencalonan diri mantan	Abdul Kadir, S.HI., M.H.	Lengkap	diluar siyasaah dusturiyah terdapat penelitian sejenis https://core.ac.uk/download/pdf/426946572.pdf	ditolak	dtolak	ditolak	ditolak
8	210203110061	AYU FEBRIA RANTIKA SARI	Formulasi Sistem Peradilan Pemilu di Indonesia (Studi Pasal 24C UUD NRI 1945 dan Pasal 74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Mahkamah	Kepemiluan	Irham Bashori, S.HI., M.H.	Lengkap	terdapat penelitian sejenis https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/arti	ditolak	dtolak	ditolak	ditolak
9	210203110023	AINUR ROSYIDA LUTHFIANA	STRATEGI PEMERINTAH DESA GRAJAGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	1. Keterbatasan infrastruktur desa sehingga membuat masyarakat terkendala untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan 2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah di era modern	Abdul Kadir, S.HI., M.H.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ditolak: isu hukum kurang kuat	diterima
10	210203110039	Kafina Imana	Studi komparasi penggunaan teknologi informasi dalam pemilu perspektif Masalah mursalah (negara Indonesia dan Amerika Serikat)	Teknologi informasi pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat	Abdul Kadir, S.HI., M.H.	Lengkap	terdapat penelitian sejenis https://ejournal.unis.ac.id/index.php/IIIA/article/view/	ditolak	dtolak	ditolak	Ditolak
11	210203110043	Nailuz Zulfa	Politik Hukum Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tanpa Batas Berdasarkan Undang-Undang Wantimpres Ditinjau dari Prinsip Good Governance	Politik Hukum Pengesahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) Terhadap penentuan jumlah anggota dewan tak terbatas yang Terdampak	Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	Diterima
12	210203110043	Nailuz Zulfa	Uji Pasal 103 PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Pada Anak Usia Sekolah dan Remaja Perspektif Masalah Mursalah Imam al-Ghazali	bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja	Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok - Judul rumuskan ulang	diterima perbaiki judul	ok	Diterima

13	210203110076	MIA NUR AIDA	PERIZINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA BANJAREJO TERHADAP FENOMENA MBEROT DALAM KESENIAN BANTENGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	Adanya atraksi mberot (menyeruduk, mengamuk) pada kesenian bantengan yang dapat membahayakan penonton seperti jatuh, terluka, terdorong, dan sebagainya. Dengan banyaknya kerumunan penonton berpotensi adanya penyimpangan seperti pencopetan, mabuk- mabukan, dan pembacokan. Di sisi lain, adanya pertunjukan kesenian bantengan ini membawa dampak baik yakni peningkatan ekonomi lokal di masyarakat dengan menjajakan dagangan mereka. Selain itu, kesenian ini sangat digandrungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia dan juga merupakan kesenian khas tradisional sehingga harus tetap dijaga kelestariannya agar tidak hilang. Perizinan yang diberikan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjarejo, tempat penelitian ini dilakukan, menjadi sangat	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	Diterima
----	--------------	-----------------	--	---	--------------------------------------	---------	--------------------	----	----	----	----------

14	210203110056	Trio Rizki Irawan	Analisis Yuridis Penyertaan Logo Pemerintah Daerah Pada Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Berdasarkan PKPU Nomor 33 Tahun 2018	Dalam prakteknya masih ditemukan kasus dimana penggunaan logo pemerintah daerah dalam kampanye tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas untuk menegakkan aturan dan menciptakan iklim politik yang sehat. Meskipun di satu sisi, penggunaan logo pemerintah daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk menunjukkan legitimasi dan kontinuitas pemerintahan. Di sisi lain, praktik ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidaknetralan pemerintah daerah dalam proses Pilkada, terutama jika salah satu kandidat adalah petahana. Sehingga penelitian bertujuan untuk	Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	Diterima
15	210203110056	Trio Rizki Irawan	Analisis Pasal 49 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 Terhadap Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Non - Korupsi Perspektif Masalah Mursalah	Isu Hukum penelitian ini yakni dalam pasal 49 PKPU No 6 tahun 2024 hanya melakukan penundaan pelantikan terhadap calon berstatus tersangka khusus tindak pidana korupsi. Padahal segala jenis tindakan kejahatan akan merusak integritas dari calon terpilih sebagai wakil rakyat yang diberikan amanat. Maka perlu pembenahan dalam pasal 49 demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan calon yang terjerat kasus hukum bukan hanya pada yang berstatus tersangka	Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima

16	210203110050	MOHAMMAD HAFIZD	Implikasi Jumlah Kementerian Tak Terbatas Berdasarkan UU Kementerian Negara Terbaru Perspektif Teori Regulatory Impact Assessment (Ria)	Politik Hukum, Hukum Tata Negara	Yayuk Whindhari, S.H., M.H., LL. M.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok - Judul rumuskan ulang	dterima dgn perbaikn redaksi shg lbh fokus	ok	diterima
17	210203110053	Ardhi Geo Aldama	STRATEGI EFISIENSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA RUANG WILAYAH 2024-2044 DALAM MEWUJUDKAN AKSELERASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	Peraturan daerah NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA RUANG WILAYAH 2024-2044 merupakan pembaharuan Pembentukan kebijakan di Banyuwangi dan memiliki Isu mengenai apakah Sudah Substansial dengan selaras dengan Prinsip Prinsip yang telah diatur UU no 26 Tahun 2007. Mengenai Wilayah banyuwangi yang jangkauan cukup luas apakah dengan Perda terdahulu RTRW Nomor 8 Tahun 2012 belum memungkinkan pembangunan keberlanjutan?. hal yang perlu diperhatikan antara lain tidak ada inkonsistensi antara regulasi baru ini dan peraturan yang lebih tinggi atau dokumen perencanaan lainnya. Transisi Ke Perda Terbaru yang dirilis beberapa bulan lalu dapat	Abdul Kadir, S.HI., M.H.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima

18	210203110053	Ardhi Geo Aldama	DINAMIKA KONFLIK OLIGARKI DAN IMPLIKASI SOSIAL KEBIJAKAN HILIRISASI PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK AL-FARABI	Adanya Dinamika Konflik yang disebabkan oleh segelintir kelompok Elit baik Sektor Nasional maupun daerah terdapat potensi tumpang tindih kewenangan. bahkan penerapan UU Minerba yang disahkan Tahun 2020 yang dibidang Minimnya partisipasi masyarakat dan cacatnya demokrasi sehingga praktik korupsi masih merajalela dimanmana yang dampaknya kepada masyarakat dan keuntungan akibat adanya hilirisasi menjadikan pasokan bahan mentah menjadi mahal dan dimanfaatkan segelintir orang. Kurangnya Transparansi Pemerintahan Menjadikan adanya Konflik of Norm dan tidak adanya Akuntabilitas Pemerintahan Mengenai Penyelesaian tersebut mengenai AAUPB yang telah diatur UU No. 30/2014 menjadi	Sheila Kusuma WA, SH., MH.	Lengkap	tidak ada plagiasi	ditolak - judul tidak fokus	dterima dgn perbaikn redaksi shg lbh fokus	ok	diterima
19	210203110055	Fitria Nurjiani	PERILAKU PARTAI POLITIK DALAM MENGHADAPI AMBANG BATAS PENCALONAN PILKADA 2024 PERSPEKTIF GIORGIO AGAMBEN DAN IBNU RUSDY	Rumusan Masalah 1. Bagaimana Independensi Partai Politik Dalam Pilkada 2024 ? 2. Bagaimana Ambang Batas Pencalonan (Treshold) Pilkada dalam pemikiran homo saker <i>Giorgino Agamben</i> ?	Imam Sukadi, S.H., M.H	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima
20	210203110054	Muhammad Zidan	Mitigasi Budaya Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Berger	UU PTPPO belum mampu untuk memberantas budaya perdagangan orang	Imam Sukadi, S.H., M.H	Lengkap	terdapat penelitian sejenis https://www.openread.academy/en/paper/reading?corpusId=191767980	Ditolak	dtolak	ditolak	ditolak

21	210203110022	Azizah Putri Andika	TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENENTUKAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PECANDU NARKOBA ANALISIS KEPASTIAN HUKUM MENURUT GUSTAV	1. Bagaimana eksistensi tanggung jawab negara dalam proses rehabilitasi narkoba di Indonesia? 2. Bagaimana prinsip-prinsip kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dapat diterapkan dalam	Prof. Dr. H Saifullah, S.H., M.Hum.	Lengkap	terdapat penelitian sejenis https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121	Ditolak	dtolak	ditolak	ditolak
22	210203110007	MIZYEL CAHYANING TYAS	MEKANISME PEMBERLAKUAN DIVERSI TERHADAP POLA KEHIDUPAN ANAK MENJADI TERSANGKA KEJAHATAN SEKSUAL PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN ISTISHAN AS-SYATIBI	1. Bagaimana prosedur diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Pola Kehidupan Anak Menjadi Tersangka Kejahatan Seksual Perspektif Teori Perlindungan Hukum? 2. Bagaimana tinjauan Istihsan As-Syatibi terhadap	Teguh Setyabudi, S.HI., M.H.	Lengkap	diluar perspektif istishan as-syatibi terdapat kesamaan issue dengan https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=z3iAEAAQRAU&oi=fnd&pg	Ditolak	dtolak	ditolak	ditolak
23	210203110062	Laila Badriyatul Mukamala	Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Femisida Perspektif Siyash Dusturiyah	vacuum of norm. tidak ada peraturan yg mengatur secara eksplisit mengenai sanksi kejahatan femisida (pembunuhan berbasis	Prof. Dr. H Saifullah, S.H., M.Hum.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok, redaksi judul diperbaiki	ok (perlu dibuat point pembaharuan agar tidak sama persis	Diterima
24	210203110085	NATHANIA SALSABILA PATRICIA DEWI	TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENGHAPUSAN PRAKTIK SUNAT PADA PEREMPUAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH PASAL 102 HURUF (a) NOMOR 28 TAHUN 2024 PERSPEKTIF	adanya pasal 102 huruf (a) pp nomor 28 tahun 2024 yang bertentangan dengan madzhab imam syafi'i	Prof. Dr. H Saifullah, S.H., M.Hum.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok - Judul rumuskan ulang		ok	diterima
25	210203110073	TIARA NUR HIDAYAH	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS (THRESHOLD) PENCALONAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF	Terkait Putusan MK mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah 2024	Sheila Kusuma WA, SH., MH.	Lengkap	diluar siyash dusturiyah terdapat kesamaan issue dengan https://ejournal.uika-	Ditolak	dtolak	ditolak	ditolak
26	210203110059	Chofifah Dyah Permatasari	Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman dalam Kebijakan Deep Seabed Mining Menurut Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia	Bagaimana Politik Hukum Pembangunan Kemaritiman dalam Kebijakan Deep Seabed Mining di Indonesia? Bagaimana Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 berkontribusi terhadap	Sheila Kusuma WA, SH., MH.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima

27	19230070	SALWA SALSABILA	KOMPARATIF HUKUM NEGARA INDONESIA DAN FILIPINA TERKAIT PENGATURAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL CATCALLING	Kekosongan norma hukum tentang pengaturan catcalling di indonesia yang memunculkan kebutuhan perbandingan dengan negara lain guna evaluasi	Yayuk Whindhari , S.H., M.H., LL. M.	Lengkap	terdapat penelitian sejenis https://www.open read.academy/en/ paper/reading?cor	Ditolak	dtolak	ditolak	ditolak
28	210203110038	Widi Astuti	Analisis Yuridis-Politis terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Objectum Litis di Peradilan Tata Usaha Negara	1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai objectum litis di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)? 2. Bagaimana pandangan politik hukum terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai objectum litis di Peradilan Tata Usaha Negara	Sheila Kusuma WA, SH., MH.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima
29	210203110091	NABILA ALINDA RAMADHANI	ANALISIS PASAL 185 A UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PADA KASUS PENCATUTAN KTP SECARA ILEGAL DALAM PROSES PILKADA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF	Ketidakpastian hukum pelaku pencatutan KTP	Yayuk Whindhari , S.H., M.H., LL. M.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima

30	210203110012	ANISA QOTRUNNADA	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI PERSPEKTIF TEORI VALUE BELIEF NORM DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI SMP NEGERI 6 KOTA KEDIRI)	Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di SMP Negeri 6 Kota Kediri menimbulkan beberapa isu hukum Pertama, bagaimana efektivitas peraturan tersebut dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah? Kedua, apakah ada kendala hukum atau praktis dalam penerapan peraturan ini, terutama terkait dengan penegakan dan sanksi bagi pelanggar? Ketiga, bagaimana peraturan ini mempengaruhi hak dan kewajiban siswa, guru, dan staf sekolah dalam konteks penggunaan plastik? Keempat, sejauh mana peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang lebih luas dan regulasi nasional tentang pengelolaan sampah plastik? Kelima, bagaimana	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima
31	18230059	Moch Idham Kholid	Peran BPD dalam menjalankan otonomi desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa prespektif AI - Ghozali	BPD desa mangliawan masih belum dikenal oleh masyarakat sana. Padahal peran BPD menurut pasal 33 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 yaitu menggali aspirasi menampung aspirasi, mengelola aspirasi masyarakat, menveleenggarakan	Abdul Kadir, S.HI., M.H.	Lengkap	terdapat objek penelitian yang sama di daerah lain https://jurnal.umsrappang.ac.id/prajaja/article/view/138	Ditolak	dtolak	ditolak	ditolak
32	18230059	Moch Idham Kholid	Penghapusan batas usia pelamar kerja berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2003 perspektif Hukum Siyasah qodoiyah	Putusan MK kemarin tentang batas calon usia pelamar kerja bertentangan dengan pasal 5 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , Menanggapi hal itu, peneliti tertarik untuk membahas	Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI.	Lengkap	tidak ada plagiasi	Ok	ok	ok	diterima